

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN KECIL DI KABUPATEN NABIRE

Farida Tuharea, SH.,MH¹

Abstrak : Perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan di Kota Nabire khususnya di Kali Bobo dan pasar Sore, masih relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, walaupun jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, khususnya dalam hal pembagian hasil usaha perikanan yakni 40% untuk kapal motor sedangkan dalam kebiasaan masyarakat hanya 20% untuk tenaga kerja kapal/perahu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah kendala penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat. Selain itu penerapan undang-undang ini kurang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya lokasi penelitian, kemudian mengenai kendala dalam perjanjian bagi hasil perikanan juga dikenal dengan beberapa musim.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nelayan Tradisional, Perjanjian, Bagi Hasil, Pemilik Kapal

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi kekayaan alam bahagia yang sangat tinggi. Sebagai besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Sejak zaman dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia di kenal sebagai

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

pelaut ulung oleh karena kelebihan mereka dalam melaut.

Sebagai bangsa yang memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi, maka tak heran jika pemerintah Indonesia semakin berinisiatif untuk menggalakkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia guna meningkatkan sumber pemasukan bagi keuangan Negara. Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis (daerah penangkapan ikan besar dan daerah penangkapan ikan kecil) dan perikanan demersal (jenis ikan yang habitatnya berada dibagian dasar perairan). Tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti perairan laut teritorial, perairan laut nusantara dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5.8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia 81.00 km² setelah Kanada dan Gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6.26 juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4.4 juta ton dapat ditangkap diperairan Indonesia dan 1.86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE.²Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan dan peran yang lebih kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan

² Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2005, Hlm. 11.

masyarakat nelayan Indonesia informasi Aktual-industri Perikanan. Kegiatan perikanan telah menjadi tradisi manusia sejak zaman purba hingga saat ini. Dan selama berabad-abad eksistensi sumber daya itu telah menjadi sumber ketahanan pangan, penghidupan dan budaya masyarakat pesisir pada umumnya.

Mengenai penghasilan bagian “Sawi” (anak buah kapal) selalu sangat kecil dan cenderung tetap apabila dibandingkan dengan bagian juragan (pemilik kapal). Selain itu, pihak juragan sebagai pemilik kapal selalu memposisikan bahwa Sawi harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal. Dengan kata lain, juragan kapal tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, melainkan permasalahan ini limpahkan kepada Sawi.

Selain itu, pada usaha penangkapan ikan, nelayan kecil dan buruh nelayan memiliki posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan ini, pemerintah harus melakukan penataan hukum yang dapat di jadikan sebagai payung kepentingan masyarakat nelayan dari ketidak berdayaannya. Meskipun hanya sebagian kecil dari penyebab kemiskinan nelayan, penataan terhadap pengaturan sistem perjanjian bagi hasil

perikanan akan sangat berguna bagi nelayan, khususnya nelayan penggarap dan nelayan buruh. Begitu juga untuk pembudi daya ikan, penataan terhadap Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan akan sangat bermanfaat dalam menciptakan kedilan.

Sistem perjanjian bagi hasil yang di atur oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan seperti tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga menjadi penyebab tidak berjalannya pola bagi hasil Undang-Undang Perikanan, hal ini tercermin dimana masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan nelayan penggarap dan penggarap tambak. Bagi hasil perikanan harus sesuai dengan rasa keadilan, yakni telah terpenuhinya kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun setelah dianalisa lebih dalam berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini masih jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan³

Perlindungan hukum terhadap nelayan dalam perjanjian bagi hasil perikanan masih terkesan sangat lemah. Rakyat semakin miskin karena pada kenyataannya nelayan tradisional selalu menghadapi rendahnya produktifitas pemanfaatan sumber daya alam pihak lain. Disamping itu

³ Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, PT. Cipta Karya Aditya, Jakarta Pusat, Tahun 2000, Hlm. 20.

kemiskinan disebabkan oleh pembangunan yang belum maksimal menjamin ini kesejahteraan sosial seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi, serta adanya pengurasan isi laut yang dilaksanakan kapal-kapal besar di wilayah nelayan tradisional.

Nelayan tradisional perlu dilindungi karena nelayan tradisional masih memanfaatkan sumber daya perikanan dengan alat penangkapan tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana. Sistem secara teoritis, sistem perjanjian bagi hasil itu untuk kesejahteraan. Pola yang diatur oleh pemerintah sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan. Namun yang terjadi di lapangan sangat berbeda, karena nelayan, khususnya nelayan pemilik kapal lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang menguntungkan satu pihak. Selain itu, sering terjadi pembagian hasil yang tidak merata antara pemilik kapal dengan Sawi atau nelayan/penggarap. Ketidak mampuan nelayan penggarap (Sawi) dalam menentukan pola bagi hasil yang mengukuhkan Sawi dalam kubangan kemiskinan sebagai salah satu penyebabnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Kota Nabire serta perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional di Kota Nabire.

PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara yang tunduk pada aturan aturan hukum. Oleh karena itu setiap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup masyarakat banyak, tentunya perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dapat tercapai.

Perlindungan hukum di artikan sebagai pengaturan tentang kebijakan tertentu yang di berikan oleh Negara yang tertuang dalam peraturan perundang undangan maupun kebijakan pemerintah yang di keluarkan semata mata untuk menghindari terbaiknya hak- hak warga negara dan sumber daya lainnya yang apabila tidak dilindungi dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.⁴

Ketika perlindungan terhadap kepentingan nelayan tradisional yang dapat dilaksanakan dengan cara pemberian hak pemanfaatan atas bagian tertentu dari perairan pantai. Perlindungan ini juga di perlukan untuk menghindari benturan antara kelompok nelayan dalam skala besar ataupun dengan usaha-usaha lain baik dengan perikanan maupun non perikanan.

Hukum yang menjelma dalam suatu peraturan mempunyai dua aspek perlindungan, yaitu preventif dan represif, perlindungan preventif mengandung pengertian usaha mencegah jangan sampai sengketa terjadi, sedangkan perlindungan represif adalah jika terjadi sengketa maka penerapan sanksi hukum melalui jalur

⁴ Gunawan Dj, Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Tradisional Di Kabupaten Majenne, Makassar. Tahun 2005, Hlm.2.

pengadilan

Hukum adalah sesuatu yang di tentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai atau mengadili mana yang merupakan perbuatan yang curang. Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi⁵.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum di integrasikan sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan yang di maksud tersebut bisa di tekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu di lakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga dapat di katakan bahwa hukum hadir dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu-individu. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang oleh hukum.

Nelayan Tradisional

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan mengertikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan

⁵ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, Tahun 2002, Hlm. 26-28.

penangkapan ikan. Dalam Undang-Undang Perikanan tersebut khususnya butir 11 tidak menggunakan istilah nelayan tradisional melainkan istilah nelayan kecil yang berarti bahwa orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana mulai dari pancing, jalan dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan metode alat tangkap ikan dan taktik penangkapan tertentu.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan baik dilaut, selat, teluk atau danau maupun sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan dengan berburu atau menggunakan perangkap. Nelayan adalah suatu kelompok Masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya⁶. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sesungguhnya bukanlah suatu tinggal yang melainkan mereka terdiri dari beberapa kelompok.

Kriteria nelayan tradisional, yaitu:

- a. Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah turun-temurun menangkap ikan di perairan tertentu
- b. Menggunakan alat yang bersifat selektif dan tidak terlarang serta ditentukan areanya.
- c. Harus dilakukan oleh perseorangan dan bukan berbentuk perusahaan.

⁶ Gunawan DJ, *Op.Cit* , Hlm.35.

Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari:

a. Syarat Subyektif (Mengenai Subyek Para Pihak)

- 1) Kata Sepakat yaitu, adanya titik temu (*a meeting of minds*) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda.
- 2) Cakap yaitu, dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya semua orang berhak melakukan perbuatan hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian kecuali orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.

b. Syarat Obyektif (Mengenai Obyek Perjanjian)

1) Suatu Hal Tertentu

Yaitu suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya.

2) Suatu Sebab Yang Halal

Yaitu suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu perbuatan yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.

Tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif diatas dapat menyebabkan

perjanjian menjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, artinya salah satu pihak dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya apabila tidak sahnya perjanjian tersebut batal demi hukum, yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap barang yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf c menyatakan secara tegas tentang pengertian bagi hasil yaitu: "Perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik suatu pihak yang dalam Undang-undang ini, penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik tanah, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak".

Pengertian terhadap suatu objek kajian mempunyai peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap objek kajian tersebut, maksud dari suatu dengan pengertian tersebut dapatlah dipahami artinya, maksud dari suatu istilah, sehingga pada akhirnya memudahkan didalam pembahasannya. Kenyataan menunjukkan bahwa orang tidak mungkin menyediakan sendiri kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia saling

memerlukan jasa atau hasil karya dari yang lainya dan untuk memperolehnya mereka saling berinteraksi.

Dalam perjanjian bagi hasil itu tidak diperlukan saksi ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana bila terjadi wanprestasi oleh masing-masing pihak. Adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad dan adat pendapatan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwakaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Sementara berpendapat bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat-istiadat, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat bagian dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Subjek Dan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Uraian mengenai subjek dan objek perjanjian bagi hasil perikanan akan dibahas secara terpisah dalam arti, membahasnya satu persatu.

1. Subjek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁷

⁷ Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm.222.

Dengan demikian, yang menjadi subjek hukum serta yang dapat dianggap sebagai subjek hukum adalah :

- a) Individu hukum
- b) Badan hukum.

Meskipun setiap manusia memiliki hak dan kewajiban akan tetapi tidak berarti bahwa setiap manusia dan akan selamanya cakap untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu selaku subjek hukum. Orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang- Undang, dan pada umumnya seumumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Secara umum subjek perjanjian bagi hasil perikanan laut dapat digolongkan dalam dua golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, yaitu:

1. Nelayan pemilik, ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
2. Nelayan penggarap, ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam memudah penguraian bentuk dan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan, akan di bahas satu persatu secara terpisah.

1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam perjanjian dimulai dengan adanya kata sepakat dari para pihak, tanpa dituntut satu bentuk atau cara lain misalnya keharusan secara tertulis atau dalam bentuk format tertentu. Berdasarkan konsensus saja dari para pihak maka perjanjian sudah lahir seketika itu dan mengikat para pihak sebagai konsekuensi logis ia berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, maka tidak ditentukan secara jelas bentuk dari perjanjian bagi hasil perikanan tersebut apakah diadakan secara tertulis atau lisan.

Dari bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa perjanjian bagi hasil perikanan tersebut dapat berbentuk lisan (tidak tertulis) yang berdasarkan pada rasa saling percaya dan itikad baik antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, akan tetapi sebaiknya perjanjian bagi hasil tersebut bentuknya tertulis atau berupa akta sebagai alat bukti yang secara hukum sah dan kuat.

Tujuan diadakannya perjanjian tertulis teruma bermaksud untuk menghindarkan keragu-keraguan, yang mungkin akan dapat menimbulkan

perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan

Berdasarkan perjanjian yang di sepakati para pihak tentang jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan batas waktunya, maka kedua belah pihak tidak terikat dalam suatu jangka waktu perjanjian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditentukan secara tegas jangka waktu perjanjian Bagi Hasil Perikanan yaitu Pasal 7 Ayat yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) :

Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit dua musim, yaitu satu tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit enam musim yaitu tiga tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka itu berakhir, diadakan pembaharuan maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Ayat(2) :

Perjanjian bagi hasil tidak putus karena pemindahan hak perahu /kapal alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik baru.

Ayat (3) :

Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan bagi hasil ini dalam prakteknya

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah yang disetujui bersama dalam perjanjiannya. Ditentukan jangka waktu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tersebut, dimana menurut kenyataannya dalam praktek peraturan atau batas waktu tersebut sama sekali belum ditentukan maka, tidak ditentukan batas waktunya karena hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat.

Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini.

Ayat (4): Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini.

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b. Dengan izin panitia landreform Desa jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
- c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan penguasaan tambaknya kepada orang lain.

Ayat (5) : pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada Ayat (4) Pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali perahu / kapal, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal/Perahu Penggarap Kapal/Perahu.

Perjanjian bagi hasil perikanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut hukum negara kita perumusannya harus tunduk dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan. Perjanjian bagi hasil perikanan tersebut, dimana perjanjian dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat oleh seorang atau beberapa orang nelayan dan pemilik kapal/perahu.

Menurut **Ridwan** (staf Dinas Perikanan dan Kelautan di Kota Nabire) unsur- unsur yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap dilokasi penelitian, adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian diadakan dalam usaha perikanan.
- 2) Perjanjian dilakukan antara seorang pemilik kapal dengan seorang atau berapa orang nelayan penggarap.
- 3) Hasil perikanan yang didapat akan dibagi menurut timbangan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Nelayan pemilik atau pemilik kapal adalah orang yang mempunyai modal terhadap suatu jenis kapal atau perahu beserta dengan alat-alat penangkapan ikan, dan secara ekonomi mereka lebih mampu jika dibandingkan dengan nelayan penggarap. Namun pengertian nelayan pemilik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, ditentukan secara tegas bentuk

perjanjian bagi hasil perikanan tersebut diadakan secara tertulis. Hal ini dapat dalam Pasal 3 ayat (2) yang pada pokoknya dalam perjanjian bagi hasil perikanan, untuk menghindari pemerasan, maka dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah Daerah tingkat II, dengan demikian untuk efektifnya pengawasan, maka perjanjian harus tertulis. Demikian pula dalam pasal 7 ayat (4) tentang penghentian perjanjian yang belum berakhir waktu berlakunya, disini dibutuhkan ketegasan mengenai batas waktu tersebut, oleh karena itu untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam perjanjian yang tertulis. Ketika tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ini, selain untuk menghindari adanya pemerasan juga untuk memberikan kedudukan hukum menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Adapun perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh pemilik kapal dilokasi penelitian, adalah perjanjian yang tidak tertulis berdasarkan kebiasaan setempat dimana perjanjian hanya dilandaskan rasa saling percaya dan tanpa harus disaksikan oleh para saksi.

Jangka Waktu Perjanjian.

Mengenai jangka waktu dari perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan antara pemilik kapal dengan penggarap kapal/perahu dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan saja hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun mengadakan tanpa perjanjian bagi hasil perikanan hanya dengan lisan tertulis para pihak juga tidak pernah menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan tersebut, jadi perjanjian dapat berakhir sewaktu- waktu jika terjadi sesuatu hal

yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik kapal dengan pihak nelayan penggarap. Pada perjanjian ini juga tidak pernah ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan tersebut karena tersebut karena memang kebiasaan mereka dari dahulu seperti itu. Selain itu. Selain itu juga ada alasan lain yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasari kedua belah pihak yaitu Pemilik kapal dengan penggarap kapal/Perahu.

Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal dan Nelayan Penggarap.

Dalam setiap perjanjian, selalu ditetapkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditaati oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat adalah Undang-Undang baginya, sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak walaupun secara lisan, adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, berhak mendapatkan bagian dari hasil perikanan, sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yakni 8% dari hasil bersih untuk pemilik kapal dan 20% untuk nelayan penggarap.
2. Pemilik kapal berkewajiban menyediakan kapal atau perahu dan juga

menyediakan alat tangkap.

3. Menyediakan Modal.
4. Memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan dan juga melakukan perurutan anggota kelompok.

Selanjutnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku dimasyarakat, sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang tercantum dalam Pasal 4 angka 1 yang menyebutkan bahwa.

- a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jalan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya.
- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik, yaitu ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang digunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Kemudian pembagian keuntungan usaha perikanan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap sesuai dengan Pasal 3 dimana pembagian adalah sebagai berikut:

- a. Jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil

bersih.

- b. Jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Dengan demikian hak dan kewajiban yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, sangat jauh berbeda dengan perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan oleh masyarakat dilokasi penelitian, akan tetapi dari kedua aturan ini terdapat kekurangan dan kelebihan, dimana dalam perundang-undangan semua biaya- biaya pengeluaran menjadi tanggungan bersama sedangkan dalam kebiasaan masyarakat dilokasi penelitian hal ini hanya tanggung jawab dari pemilik kapal sehingga memberatkan bagi nelayan penggarap.

Dalam struktur ekonomi masyarakat nelayan dikenal adanya pemilik modal dan penggarap adalah peminjam atau pekerjaan atau juga dapat disebut buruh atau bahasa undang-undangnya nelayan kecil. Pemilik modal berhak membeli hasil tangkapan yang diberi modal, kemudian penggarap berkewajiban menjual hasil tangkapannya kepada pemilik modal yang diberikan. Kewajiban ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan. Modal yang diberikan oleh pemilik kapal/perahu tidak terbatas pada modal materi berupa uang, namun juga kepada peralatan seperti kapal, mesin kapal, jaring, pancing, pukat, dan sebagainya. Begitu kuatnya peran pemilik dalam mengatur pengelolaan usaha perikanan laut ini ditandai dari hulu hingga hilir. Sejak membutuhkan modal awal untuk kerja di laut menangkap ikan, hingga pemasaran hasil tangkapan ikannya, semuanya harus dilakukan atas kendali pemilik modal.

Tanggung Jawab Atas Resiko Dan Kelalaian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

Sehubungan dengan masalah resiko yang dapat terjadi dalam perjanjian bagi hasil perikanan, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang diluar kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak, seperti musnahnya hasil perikanan yang merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan perjanjian bagi hasil perikanan tidak dapat terlaksanakan sebagai mana mestinya Dalam hubungannya dengan resiko Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, maka landasannya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, namun dalam undang-undang ini tidak satupun pasal yang mengatur masalah resiko. Oleh karena itu sesuai dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kepada para pihak untuk mengatur dan menentukan sendiri dalam perjanjiannya. Maka dalam hal ini yang menjadi tolak ukur adalah surat perjanjian bagi hasil perikanan, tetapi kenyataannya, perjanjian bagi hasil perikanan diadakan tidak secara tertulis, melainkan secara lisan saja.

Dengan demikian tampak, bahwa permasalahan kelalaian dari salah satu pihak dalam perjanjian bagi hasil perikanan pada hukum kebiasaan masyarakat, selalu diselesaikan menurut kebiasaan masyarakat tanpa melibatkan lembaga peradilan, karena prinsip dasar masyarakat dalam penyelesaian masalah selalu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Tanggung Jawab Nelayan Penggarap Kepada Pemilik Kapal/Perahu.

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perikanan, pemilik kapal atau pemilik

modal melepaskan kapal nelayan penggarap, merupakan tanggung jawab nelayan kepada pemilik modal untuk merawat kapal tersebut agar tetap dalam kondisi yang bagus, supaya kapal tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Setiap nelayan penggarap bertanggung jawab penuh atas suatu kapal dan juga bertanggung jawab kepada semua mesin yang ada di kapal. Jika ada mesin di kapal ada yang rusak penggarap juga bertanggung jawab kepada pemilik kapal.

Kendala-Kendala Yang Sering Muncul Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

Setiap bentuk lembaga yang ada dalam masyarakat, seperti perjanjian bagi hasil perikanan, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan, serta tingkat kebutuhan masyarakatnya, demikian juga kendala-kendala yang ada dalam perjanjian bagi hasil perikanan semakin multi kompleks seiring dengan perkembangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga kontrol dalam masyarakat khususnya pada dinas-dinas yang terkait dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan, untuk lebih pro aktif memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat guna meminimalisir permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil perikanan, mengigat potensi perikanan laut khususnya di Nabire ini sangat besar jika dioptimalkan dengan beberapa keuntungan diantaranya tersedianya lahan, terbukanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan para nelayan dan pemasukan Pajak Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

Suatu peraturan dalam negara dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban,

keselarasan, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat, demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 untuk mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat, agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaannya, yang mana perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat senantiasa bertentangan dengan prinsip-prinsip usaha bersama yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil, maka dengan adanya undang-undang ini, hal tersebut tidak terjadi, karena undang-undang ini memiliki sifat memaksa, akan tetapi terkadang undang-undang lahir hanya sebatas tertuang dalam lembaran negara saja, namun dalam pelaksanaannya tidak efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atau peraturan tersebut telah ketinggalan dan tidak berlaku lagi dengan perkembangan masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga kontrol dalam masyarakat khususnya pada dinas-dinas yang terkait dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan, untuk dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting didalam mengelola sumber ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah didalam mengelola sumberdaya alam untuk sumberdaya ikan ini sangat dibutuhkan oleh nelayan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para nelayan tradisional belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari nelayan tradisional sampai saat ini

belum mendapatkan perlindungan hukum, karena tidak adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi masalah nelayan tradisional. Selain itu, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional tidak ada karena tidak adanya perubahan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan maupun perda yang mengatur mengenai bagi hasil perikanan.

Kegiatan eksplotasi seperti penangkapan mengalami peningkatan terutama bagi komoditas unggulan seperti teripang dan ikan-ikan karang. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan pasar lokal, antar pulau, terlebih lagi untuk ekspor. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk menggunakan berbagai macam-macam cara termasuk cara-cara yang merusak dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan.

Penggunaan bom dan obat bius merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan utamanya terumbu karang, sekaligus mengancam kesinambungan usaha penangkapan oleh nelayan itu sendiri. Hal yang paling merasakan akibatnya adalah masyarakat nelayan tradisional yang mempunyai keterbatasan alat dan hanya mampu menangkap ikan disekitar pulau-pulau saja, dibandingkan dengan nelayan yang mempunyai alat tangkap yang lebih modern, dan mempunyai permodalan yang kuat sehingga mampu untuk menangkap ikan diluar pulau.

Bantuan Dari Bank Pemerintah.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah belum maksimal, hal ini

disebabkan tidak adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi konflik yang sering terjadi pada bidang perikanan, dan juga tidak adanya perubahan aturan mengenai perjanjian bagi hasil perikanan, selain dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, tentang Bagi Hasil Perikanan.

Peran pemerintah juga di anggap sangat lemah terhadap para nelayan, di sebabkan para nelayan tidak dapat melakukan pinjaman kepada Bank Pemerintah, karena seorang nelayan selalu dianggap orang yang paling miskin, sehingga tidak dapat melakukan pinjaman kepada bank, karena harus ada barang yang menjadijaminan, sedangkan seorang tenaga kerja di kapal/perahu tidak memiliki barang yang bisa dijadikan jaminan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan di Kota Nabire khususnya di Kali Bobo dan pasar Sore, masih relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, walaupun jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, khususnya dalam hal pembagian hasil usaha perikanan yakni 40% untuk kapal motor sedangkan dalam kebiasaan masyarakat hanya 20% untuk tenaga kerja kapal/perahu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama.

Bahwa kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah

kendala penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat. Selain itu penerapan undang-undang ini kurang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya dilokasi penelitian, kemudian mengenai kendala dalam perjanjian bagi hasil perikanan juga dikenal dengan beberapa musim.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, Tahun 2002.

Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2005.

Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, PT. Cipta Karya Aditya, Jakarta Pusat, Tahun 2000.

Gunawan DJ, Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Di Kabupaten Majenne.Makassar. Tahun 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.